FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018
TENTANG
UANG ELEKTRONIK

1. Mengapa Bank Indonesia perlu menerbitkan kembali peraturan mengenai Uang Elektronik (UE)?

- a. Inovasi teknologi menyebabkan semakin banyaknya pelaku yang masuk ke dalam industri UE, sehingga perlu dilakukan penguatan terhadap aspek kelembagaan untuk memastikan tersaringnya penyelenggara UE yang kredibel, bermanfaat bagi perekonomian nasional, berkelanjutan (*sustainable*) dan memperhatikan perlindungan terhadap konsumen pengguna UE.
- b. Semakin menguatnya tendensi integrasi bisnis dalam satu mata rantai yang sama (*vertical integration*) maupun tendensi konglomerasi bisnis (*horizontal integration*) secara domestik maupun global membutuhkan kebijakan untuk memastikan persaingan usaha yang sehat, mencegah fragmentasi dalam industri UE, dan menjaga daya saing perekonomian nasional.
- c. Meningkatnya risiko-risiko seiring perkembangan bisnis UE perlu diantisipasi dengan pengaturan mengenai penerapan manajemen risiko dan standar keamanan UE serta penguatan aspek pengawasan terhadap penyelenggara UE.

2. Apa dasar pertimbangan Bank Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan UE *closed loop* dalam PBI ini?

Perkembangan inovasi teknologi, termasuk perkembangan transaksi *e-commerce*, dewasa ini mendorong semakin meluasnya penggunaan instrumen pembayaran serupa UE yang digunakan secara terbatas atau yang umum dikenal sebagai *closed loop*. Dengan mempertimbangkan jumlah Pengguna dan nilai Dana *Float* yang semakin meningkat, serta untuk memastikan perlindungan konsumen, penyelenggaraan UE *closed loop* perlu diatur oleh Bank Indonesia. Cakupan pengaturan antara lain meliputi kewajiban izin, penerapan manajemen risiko, pengelolaan Dana *Float*, dan kewajiban lain terkait penyelenggaraan kegiatan UE.

Pengaturan UE *closed loop* dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan skala bisnis penyelenggaraan yang dilakukan dan dengan tetap mendukung perkembangan *economy digital* di Indonesia termasuk mengakomodir para pelaku *starts up*, antara lain melalui penerapan kewajiban izin yang hanya diberlakukan bagi

pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan UE *closed loop* dengan Dana *Float* mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih.

3. Mengapa dan bagaimana Bank Indonesia menetapkan pengelompokan izin Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran?

Secara prinsip, penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran oleh tiap-tiap jenis Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran disadari memiliki karakteristik bisnis dan risiko yang berbeda. Hal ini menuntut pemahaman, fokus, dan pendekatan pelaksanaan kegiatan usaha yang tepat dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Untuk mendukung hal tersebut, perlu ditetapkan pengelompokan izin penyelenggara guna memastikan perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan usaha yang tepat dan terfokus sesuai karakteristik bisnis serta pengendalian risiko yang efektif agar setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dapat berperan dalam terselenggaranya kegiatan jasa sistem pembayaran yang aman, andal, efisien, dan lancar serta mendukung sustainabilitas industri.

Berdasarkan karakteristik bisnis dan jenis risiko, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

- a. Kelompok penyelenggara *front end*, yang terdiri atas izin sebagai Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara Dompot Elektronik, dan Penyelenggara Transfer Dana.

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dalam kelompok ini menyediakan layanan kepada Pengguna dan/atau Penyedia Barang dan/atau Jasa (*business to customer*), yang ditunjukkan dengan adanya hubungan secara langsung dan bertanggung jawab kepada Pengguna dan/atau Penyedia Barang dan/atau Jasa tersebut (*customer oriented*) atas setiap layanan jasa sistem pembayaran yang disediakan.

- b. Kelompok penyelenggara *back end*, yang terdiri atas izin sebagai Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dalam kelompok ini menyediakan layanan jasa sistem pembayaran kepada sesama Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran seperti Penerbit dan/atau *Acquirer* (*business to business*) serta tidak memiliki hubungan secara langsung dengan Pengguna dan/atau Penyedia Barang dan/atau Jasa.

4. Apakah 1 (satu) entitas dapat mengajukan atau memiliki lebih dari 1 (satu) jenis izin sebagai Penyelenggara?

1 (satu) entitas dapat mengajukan atau memiliki lebih dari 1 (satu) jenis izin sebagai Penyelenggara sepanjang izin tersebut merupakan izin dalam kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang sama.

Contoh:

PT A yang telah memiliki izin sebagai Penerbit dapat mengajukan izin sebagai *Acquirer*. Sebaliknya PT A tidak dapat mengajukan izin sebagai Prinsipal, karena Penerbit dan Prinsipal merupakan izin yang berada pada kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang berbeda.

5. Mengapa Bank Indonesia mengatur mengenai batasan bagi setiap pihak untuk menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari 1 (satu) LSB yang memiliki izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran?

Sejalan dengan upaya untuk memastikan penerapan perlindungan konsumen, peningkatan tata kelola yang baik, dan menjaga persaingan usaha yang sehat, diperlukan adanya pengaturan mengenai pembatasan atau larangan bagi setiap pihak untuk menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari 1 (satu) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tertentu.

Pengaturan tersebut juga dimaksudkan untuk menciptakan industri UE yang sehat dengan mengurangi terjadinya risiko sistemik dari sisi Penyelenggara akibat adanya kepemilikan tunggal pada lebih dari 1 (satu) Penyelenggara.

6. Siapa sajakah yang dimaksud sebagai pemegang saham pengendali dalam PBI UE ini?

Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali dalam PBI ini adalah pihak, baik individu maupun badan hukum bukan Bank yang memiliki:

- a. saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Penyelenggara UE dan mempunyai hak suara; atau
- b. saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Penyelenggara UE dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pengendalian terhadap Penyelenggara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal pemegang saham pengendali berbentuk badan hukum, penentuan pemegang saham pengendali dapat dilakukan sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir badan hukum tersebut (*ultimate shareholder*).

7. Mengapa Bank Indonesia mengatur komposisi kepemilikan saham bagi Lembaga Selain Bank (LSB) yang akan menjadi Penerbit?

Pengaturan komposisi kepemilikan saham bagi Penerbit berupa LSB dalam PBI ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing industri UE nasional dan secara umum mendorong peran pelaku domestik dalam jasa sistem pembayaran. Hal ini sejalan dengan pengaturan komposisi kepemilikan saham bagi Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring Dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah terlebih dahulu diatur dalam PBI No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

8. Mengapa Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban mayoritas anggota direksi Penyelenggara berdomisili di Indonesia?

Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip penyelenggaraan UE dan mendukung penyelenggaraan kegiatan UE oleh Penyelenggara yang optimal antara lain melalui pendekatan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan industri UE di Indonesia, diperlukan adanya peran serta secara langsung oleh direksi sebagai pihak yang menjalankan pengurusan perusahaan sehari-hari di Indonesia.

Kewajiban berdomisili di Indonesia bagi mayoritas anggota direksi juga akan mendukung kelancaran koordinasi dengan Bank Indonesia baik dalam rangka pengawasan maupun penyampaian dan pemahaman atas kebijakan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran.

9. Bagaimanakah pengaturan terhadap bentuk kerja sama yang saat ini berkembang seperti *white labelling*?

Secara umum setiap kerja sama yang terkait dengan penyelenggaraan UE wajib dilaporkan atau dimintakan persetujuan kepada Bank Indonesia.

Dalam penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran, termasuk UE, kerja sama *white labelling* merupakan kerja sama antara Penyelenggara dengan pihak lain yang juga bertindak atau akan mengajukan izin sebagai Penyelenggara dalam rangka penyediaan atau pemanfaatan infrastruktur yang dimiliki oleh Penyelenggara.

Penyediaan atau pemanfaatan infrastruktur dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko, keamanan dan keandalan infrastruktur, perlindungan konsumen serta memastikan terpenuhinya seluruh kewajiban yang diatur dalam PBI UE baik bagi Penyelenggara menyediakan infrastruktur maupun pihak yang menggunakan atau memanfaatkan infrastruktur tersebut, seperti kewajiban untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara.

10. **Apakah Penerbit dapat menambahkan penerapan standar keamanan transaksi pada otentikasi 2 (dua) factor (*two factor authentication*) untuk UE yang memiliki batas Nilai UE di atas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)?**

Dengan tetap memperhatikan efisiensi dan kenyamanan penggunaan UE oleh Pengguna, Penerbit dapat menambahkan fitur keamanan tambahan pada otentikasi 2 (dua) factor (*two factor authentication*). Misalnya, selain menerapkan penggunaan PIN (Personal Identification Number) Penerbit dapat pula mewajibkan penggunaan OTP (*One Time Password*) untuk transaksi pembayaran tertentu.

11. **Apa pertimbangan peningkatan batas nilai UE *unregistered* menjadi paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)?**

Peningkatan batas nilai UE *unregistered* dari semula paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dilakukan dalam rangka mengakomodir perkembangan kebutuhan penggunaan UE *unregistered* untuk transaksi pembayaran dengan nilai yang lebih tinggi dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) kali transaksi dengan tetap memperhatikan aspek keamanan transaksi serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

12. **Apakah Penerbit dapat menyediakan fitur transfer dana pada UE?**

Penerbit dapat menyediakan fitur transfer dana pada UE sepanjang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara transfer dana dan hanya dapat disediakan untuk UE *open loop registered*. Fitur yang dapat disediakan merupakan transfer dana yang bersifat *outgoing*, misalnya transfer antar Pengguna (*P to P*) atau transfer dari UE ke rekening simpanan (*P to Account*).

13. **Apakah dalam melakukan audit sistem informasi, Penyelenggara dapat menggunakan jasa pihak internal?**

Penyelenggara dapat menggunakan jasa baik *security auditor* independen eksternal maupun internal yang independen. Dalam hal ini, penggunaan jasa *security auditor* independen internal diartikan bahwa *security auditor* atau unit/satuan kerja internal di Penyelenggara yang melakukan fungsi audit tersebut merupakan satuan/unit kerja yang terpisah dari anggota direksi atau satuan/unit kerja yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

Adapun *security auditor* independen eksternal yang dapat digunakan untuk melakukan audit sistem informasi oleh Penyelenggara adalah pihak yang memiliki kompetensi sebagai auditor sistem informasi.

14. **Mengapa Bank Indonesia perlu menetapkan pembagian porsi penempatan Dana *Float*?**

Dalam penyelenggaraan UE, penempatan Dana *Float* merupakan salah satu bagian dari pengelolaan Dana *Float* yang dilakukan dalam rangka mendukung perlindungan konsumen. Dengan semakin berkembangnya penyelenggaraan UE dan bervariasinya skala usaha Penerbit UE di Indonesia, pengaturan penempatan Dana *Float* tidak hanya dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen namun juga sebagai upaya pengendalian dan mitigasi atas risiko likuiditas dan risiko *insolvency* dalam penyelenggaraan UE yang diterapkan melalui pembagian porsi penempatan Dana *Float*.

Pengaturan pembagian porsi penempatan Dana *Float* tersebut ditetapkan dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas Penerbit dalam memenuhi kewajiban kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa, sekaligus dapat memberikan manfaat atau nilai tambah bagi Penerbit dengan tetap memastikan aspek keamanan melalui pembatasan penempatan hanya pada instrumen yang aman dan likuid.

15. **Bagaimanakah pengaturan terhadap penyelenggaraan UE *closed loop* yang Dana *Float*-nya belum mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)?**

Pihak yang menyelenggarakan UE *closed loop* namun belum mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tetap harus memperhatikan ketentuan mengenai penyelenggaraan UE yang diatur dalam PBI ini paling sedikit berupa penerapan manajemen risiko dan perlindungan konsumen.

Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta laporan terkait penyelenggaraan UE *closed loop* kepada pihak tersebut.

16. **Untuk kebutuhan penerimaan pembayaran dari Pengguna, apakah Penerbit dapat menyediakan UE kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa dengan Nilai UE yang melebihi batas Nilai UE yang diatur dalam PBI ini?**

Dalam rangka mengakomodir kebutuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk menerima pembayaran dari Pengguna, Penerbit dapat menyediakan akun pencatatan Nilai UE dari Penyedia Barang dan/atau Jasa. Akun pencatatan dimaksud tidak dapat digunakan oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melakukan transaksi yang bersifat *outgoing* seperti pembayaran transaksi pembelanjaan, pembayaran tagihan, transfer dana, dan/atau tarik tunai. Batas Nilai UE yang diatur dalam PBI ini tidak berlaku bagi akun pencatatan tersebut.

Dalam hal Penyedia Barang dan/atau Jasa bermaksud untuk melakukan transaksi UE yang bersifat *outgoing*, maka Penyedia Barang dan/atau Jasa tersebut harus

membuka dan menggunakan UE sebagai Pengguna terlebih dahulu yang terpisah dari akun pencatatan tersebut.

17. Apakah yang dimaksud dengan pengawasan terintegrasi yang dapat dilakukan Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan UE oleh Penyelenggara?

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha di Indonesia, termasuk berkembangnya ragam jenis usaha dan meningkatnya integrasi bisnis yang dijalankan baik oleh Penyelenggara maupun pihak lain yang terafiliasi dengan Penyelenggara, perlu adanya pengawasan yang terintegrasi antara lain terhadap eksposur risiko, tata kelola, dan pengendalian risiko dari Penyelenggara, perusahaan induk, perusahaan anak, pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara, dan/atau pihak terafiliasi lainnya.

Pengawasan terintegrasi bertujuan untuk memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip penyelenggaraan UE termasuk penerapan perlindungan konsumen, terpeliharanya persaingan usaha yang sehat dan sustainabilitas Penyelenggara dan industri UE di Indonesia.

18. Apakah LSB yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit sebelum PBI UE ini berlaku wajib melakukan penyesuaian komposisi kepemilikan saham?

Penerbit berupa LSB wajib menyesuaikan komposisi kepemilikan saham setelah berlakunya PBI ini apabila terdapat perubahan kepemilikan yang menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan asing.

19. Bagaimana dengan Penerbit berupa Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebelum PBI ini berlaku, memiliki modal disetor di bawah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)?

Penerbit berupa Lembaga Selain Bank yang memiliki modal disetor dibawah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) wajib meningkatkan modal disetornya menjadi sebesar paling sedikit RP3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) paling lambat 6 (enam) bulan sejak PBI ini berlaku.

Penerbit tersebut juga wajib memenuhi ketentuan mengenai peningkatan modal disetor yang disesuaikan dengan nilai Dana *Float* yang dilakukan paling lambat akhir bulan Juni tahun 2019.

20. Bagaimanakah masa berlaku izin bagi Penyelenggara yang telah memperoleh izin sebelum PBI ini berlaku?

Izin sebagai Penyelenggara yang telah diberikan sebelum PBI ini berlaku tetap berlaku selama 5 (lima) tahun sejak PBI ini berlaku.